

***THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WOMEN'S
SPECIAL SAVINGS AND LOAN PROGRAMME IN KAJORAN SUB-DISTRICT,
MAGELANG DISTRICT***

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS
PEREMPUAN DI KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG**

Ariefina Irfania Sulaimi¹, M. Ikhsan², Harsono³

Universitas Terbuka, Indonesia^{1,2,3}

irfaniasusantoksw@gmail.com¹, ikhnanm63@gmail.com², harsono.sariyo@kemendikbud.go.id³

ABSTRACT

This study aims to assess the effectiveness of the implementation of a women's savings and loan program (SPP) in Kajoran District, Magelang Regency, as part of a community empowerment program. This study uses a descriptive evaluative method with a qualitative approach and involves 33 informants consisting of administrators and members of SPP groups from various villages in Kajoran District. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and validated using triangulation techniques. Based on the results of the study, the SPP program runs well and is effective in empowering women from poor productive households to increase their income. This program helps meet primary to tertiary needs through micro-enterprise funding, basic social support, and strengthening savings and loan institutions for women. The evaluation model used is the CIPP (Context, Input, Process, Product) model which includes control, input, process, and results. The source of the program budget comes from previous empowerment programs, namely PPK and PNPM-Mandiri Pedesaan. The SPP program is considered right on target, with effective implementation in returning loan funds, mentoring by administrators, and increasing income and budget for the next business capital. The suggested recommendations include increasing commitment to supporting women's welfare, tightening capital loan requirements to reduce late payments, increasing coordination with related agencies for training, and innovation from program participants so that income increases and loan funds can continue to circulate smoothly.

Keywords: Community Empowerment, Women's Special Savings and Loans Program, SPP program, Activity Management Unit (UPK)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan melibatkan 33 informan yang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok SPP dari berbagai desa di Kecamatan Kajoran. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian, program SPP berjalan dengan baik dan efektif dalam memberdayakan perempuan dari rumah tangga miskin produktif untuk meningkatkan pendapatan. Program ini membantu pemenuhan kebutuhan primer hingga tersier melalui pendanaan usaha mikro, dukungan sosial dasar, dan penguatan kelembagaan simpan pinjam bagi perempuan. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang mencakup kontrol, masukan, proses, dan hasil. Sumber anggaran program berasal dari program pemberdayaan sebelumnya, yaitu PPK dan PNPM-Mandiri Pedesaan. Program SPP dinilai tepat sasaran, dengan pelaksanaan yang efektif dalam pengembalian dana pinjaman, pendampingan oleh pengurus, serta peningkatan pendapatan dan anggaran untuk modal usaha berikutnya. Rekomendasi yang disarankan meliputi peningkatan komitmen dalam mendukung kesejahteraan perempuan, pengetatan syarat pinjaman modal untuk mengurangi keterlambatan pembayaran, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelatihan, serta inovasi dari peserta program agar pendapatan meningkat dan dana pinjaman dapat terus berputar dengan lancar.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan, Program SPP, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, peningkatan taraf hidup maupun perekonomian merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat miskin akan sumber daya, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat yang terabaikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yaitu dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan program pemberdayaan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai ditetapkan pada tahun 1998 yang kemudian dialihkan menjadi Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Dalam pelaksanaan kegiatan operasional hariannya, BKAD memberikan wewenang dan kuasa mengelola kegiatan dan usaha kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Kecamatan Kajoran merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang yang melaksanakan program simpan pinjam yang dikhususkan untuk kaum perempuan atau sering disebut dengan SPP. Program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dikelola oleh UPK. Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran sudah dimulai sejak

tahun 2003 dan di setiap tahunnya program tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan pelaksanaan program SPP dapat dilihat dari jumlah pemanfaat yang telah mengalami peningkatan 126% sejak terbentuknya program tersebut. Pada tahun 2003 jumlah penerima manfaat hanya berkisar 31 (tiga puluh satu) kelompok dengan anggota berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima), sedangkan pada tahun 2023 terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) kelompok dengan anggota berjumlah 1.983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) desa. Dengan adanya bantuan permodalan, masyarakat Kecamatan Kajoran dapat mengembangkan usaha yang kemudian berpengaruh pada perolehan pendapatan sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri.

Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran dapat dikatakan memiliki peningkatan yang cukup pesat. Namun di sisi lain, pelaksanaan program tersebut menjadikan kelompok penerima manfaat bukan lagi sebagai subjek, melainkan menjadi objek karena 26% dari jumlah peminjam atau sekitar 17 (tujuh belas) kelompok penerima pinjaman modal usaha dalam program SPP menunggak dalam pengembalian dana pinjaman modal usaha. Dana pinjaman modal usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan pangan, kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya. Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM) dimana program tersebut merupakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian

Dalam Negeri. Dengan demikian, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang terkadang tidak sesuai dengan tujuan dari program yaitu pemberian dana pinjaman modal usaha bagi kaum perempuan yang berasal dari RTM. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program SPP juga dapat dinilai dari seberapa jauh tercapainya tujuan dari program tersebut. Dengan demikian, penelitian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh penulis guna menumbuhkan partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya pada program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu dalam hal peningkatan kemandirian untuk mencapai kesejahteraan hidup. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang”.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan

Kebijakan menurut Anderson (Meutia 2017) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan menurut pendapat Fredrich (Agustian 2019), kebijakan merupakan kegiatan di suatu lingkungan yang diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam menentukan suatu kebijakan, terdapat beberapa tahapan pengambilan kebijakan yang merupakan prinsip dasar dari permasalahan suatu kebijakan tersebut. Salah satu prinsip dasar kebijakan yaitu analisa kebijakan. Analisa kebijakan merupakan suatu

proses sementara dalam penyusunan kebijakan yang bersifat politis.

Guna menyelesaikan permasalahan publik, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan dan barang publik. Selain membuat suatu kebijakan, pemerintah juga perlu membentuk barang publik guna menyelesaikan masalah publik. Barang publik menurut Idris (Pratama 2022) merupakan barang yang dapat digunakan oleh seseorang maupun kelompok tanpa perlu mengeluarkan biaya dan tidak memiliki batasan penggunaan. Menurut pendapat Herdiana (Dewi 2019), proses kebijakan publik terdiri dari formulasi kebijakan atau proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan atau disebut proses pelaksanaan kebijakan publik, dan evaluasi atau proses penilaian terhadap kebijakan publik. Muchlis (Meutia 2017) menjelaskan bahwa sebuah kebijakan dapat dinilai tepat apabila efektif, efisien, kecukupan, dan keadilan.

Teori Evaluasi Kebijakan

Salah satu mata rantai dalam proses pelaksanaan kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah yaitu evaluasi kebijakan. Eyestone, R. (Meutia 2017) menjelaskan bahwa hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya disebut dengan kebijakan publik. Sedangkan kebijakan publik menurut pendapat Thomas R. Dye (Dan et al. 2000) merupakan segala ketentuan pemerintah yang perlu dilakukan maupun tidak dilakukan. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan dampak yang harus dipertimbangkan ketika membahas evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Thomas R. Dye (Zakirin and Arifin 2022) berpendapat bahwa dampak kebijakan atau sering disebut dengan *policy impact/policy consequences* merupakan efek yang ditimbulkan oleh

suatu kebijakan. Penilaian dampak dalam suatu kebijakan pemerintah bertujuan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi baik dampak yang menguntungkan maupun intervensi terhadap kebijakan tersebut. Winarno, B. (Zakirin and Arifin 2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan dampak suatu kebijakan yaitu dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) pada masalah serta pada individu maupun kelompok yang terlibat dalam kebijakan; dampak yang melimpah atau termasuk dalam limbah kebijakan (*externalities or spillover effects*) dimana suatu kebijakan tersebut memiliki kemungkinan berdampak di luar sasaran atau tujuan kebijakan; pada masa yang akan datang kemungkinan terdapat dampak pada suatu kebijakan; kemungkinan suatu kebijakan akan berdampak pada biaya langsung (*direct costs*); dan kemungkinan suatu kebijakan berdampak terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) individu maupun kelompok.

Dalam pelaksanaan proses evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program pemerintah, ahli mengemukakan terdapat beberapa model evaluasi yaitu model evaluasi Kirkpatrick lebih dikenal dengan *Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model* (Ritonga, Saepudin, and Wahyudin 2019) yang terdiri dari 4 (empat) level evaluasi yaitu evaluasi reaksi, evaluasi belajar, evaluasi perilaku, dan evaluasi hasil; model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang merupakan model evaluasi dengan mempertimbangkan konteks, input, proses, dan produk (Rama et al. 2023); model evaluasi Countenance Stake (Bachtiar and Vleuten 2016) yang merupakan model

evaluasi pertimbangan dimana dalam pelaksanaannya akan membandingkan hasil antara program satu dengan program lainnya yang memiliki objek yang sama dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya; model evaluasi UCLA merupakan hasil pengembangan model evaluasi oleh Alkin (Harahap et al. 2024) dimana evaluasi digunakan dalam pemilihan beberapa alternatif dalam pembuatan suatu keputusan dengan cara meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, serta mengumpulkan dan menganalisis informasi; dan model evaluasi Brinkerhoff menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan penggabungan beberapa elemen yaitu *fixed vs emergent evaluation design*; *formative vs summative evaluation*; dan *experimental and quasi experimental design vs natural/unobtrusive inquiry*. Selain melakukan evaluasi kebijakan, guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan suatu program pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah juga dapat dilakukan dengan mencari tahu keefektifan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Teori Efektivitas

Pada umumnya, efektivitas merupakan suatu pencapaian dalam sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif dengan melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan serta sejauh mana kesesuaian suatu kegiatan dengan yang diharapkan. Efektivitas menurut pendapat Ravianto (Rama et al. 2023) merupakan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Supardi (Rama et al. 2023), efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencapai kebutuhan dan rencana baik dalam

bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, Robbins (Erawati, Darwis, and Nasrullah 2017) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencapaian suatu organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Disini dapat diartikan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif dilihat dari segi keberhasilan atas tercapai atau tidaknya suatu sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan kata lain, apabila pencapaian suatu kegiatan semakin dekat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka semakin tinggi juga keefektifan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Steers, R. M. (Arifin and Yuniningsih 2019) mengemukakan bahwa efektifitas suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja/karyawan, dan kebijakan dan praktek manajemen yang dirancang guna membentuk segala sesuatu demi mencapai efisisensi organisasi. Hasibuan (Bloom and Reenen 2013) menjelaskan bahwa dalam mengukur keefektifan suatu kegiatan terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan yaitu kualitas kerja berupa hasil kerja karyawan dalam bentuk kerapian, ketelitian, serta keterkaitan hasil; kuantitas kerja berupa volume kerja pada saat kondisi normal yang dapat dilihat dari beban kerja dan keadaan yang dialami pada saat berkerja; dan pemanfaatan waktu yang telah disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Dalam penilaian efektivitas suatu kebijakan/program yang dibentuk oleh pemerintah, William (Yunida 2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan evaluasi yang perlu dilakukan yaitu evaluasi semu (*pseudo evaluation*), evaluasi formal (*formal evaluation*), dan evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*). Penelitian yang dilakukan yaitu melalui

evaluasi terhadap suatu program sehingga dapat memperoleh hasil yang menjelaskan keefektifan pelaksanaan suatu program khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut pendapat Sukmasari (Oktriawan, Adriansah, and Alisa 2021) merupakan suatu kondisi tercukupinya kebutuhan dasar baik kebutuhan sandang maupun papan, terjangkau biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang berkualitas, serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu menurut Maeswara (Martani 2016), kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir yang meliputi kesejahteraan ekonomi sosial baik sandang, pangan, maupun papan dan keinginan batin yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat. Soetomo (Tuaty 2023) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yaitu tingkat pendidikan masyarakat, kesehatan, akses listrik dan air, jumlah penduduk miskin; keadilan ekonomi berupa tingkat pendapatan dan pengeluaran serta kepemilikan rumah; dan keadilan demokrasi berupa akses informasi dan rasa aman yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir buku berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 menjelaskan bahwa guna mencapai kehidupan bermasyarakat yang lebih baik merujuk pada indikator kependudukan yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan; indikator kesehatan dan gizi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas serta kesejahteraan

masyarakat; indikator pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja; indikator ketenagakerjaan bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan produktif; indikator taraf dan pola konsumsi bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan daya beli masyarakat; indikator perumahan dan lingkungan bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan; indikator kemiskinan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan program perlindungan sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan; dan indikator sosial lainnya mencakup akses terhadap keamanan, partisipasi, serta keamanan masyarakat. Selain itu, Badan Pusat Statistik 2023 juga menjelaskan bahwa beberapa aspek seperti indikator demografi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, dan indikator sosial lainnya dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, pemenuhan kebutuhan konsumsi pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan non pangan <80% pendapatan yang diperoleh, pendidikan wajib minimal 9 (sembilan) tahun, perumahan dengan minimal luas lantai 10 m dan bagian terluasnya bukan tanah dengan status kepemilikan pribadi, dan kesehatan dengan melihat dari umur harapan hidup dan waktu lahir, melek huruf, serta pengeluaran riil perkapita. Salah satu kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah guna

meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Sudarmanto, E. dkk (Bambang Setyadarma, Tri Tjahjo Poernomo, and Husni Indrawati Wijaya Putri 2021) menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan terbelakang yaitu dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui beberapa cara yaitu memberikan motivasi, membangun kesadaran, mendorong, serta membantu mengembangkan potensi masyarakat. Sedangkan Suhaimini (Julika and P 2016) menjelaskan bahwa pemberdayaan digunakan sebagai sarana melakukan pembangunan baik lingkungan maupun masyarakat. Masyarakat memiliki posisi yang penting dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan sumber daya baik material maupun non material. Disini dapat disimpulkan bahwa salah satu program pemerintah untuk mengembangkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan negara dan penanggulangan kemiskinan yaitu program pemberdayaan masyarakat. Mardikanto dkk. (Nardin 2019) berpendapat bahwa terdapat beberapa strategi yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi tepat guna yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat* (Maryani, Dedeh and

Nainggolan 2019) mengemukakan beberapa tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemfomalisasi rencana aksi, implementasi program atau kegiatan, evaluasi, dan terminasi. Pemerintah membentuk suatu program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri

Salah satu permasalahan kompleks di Indonesia yaitu terkait kemiskinan. Beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dikelola secara maksimal, minimnya pengetahuan guna mengembangkan perekonomian baik dari segi pertanian, perindustrian, dan lain sebagainya. Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu program pemberdayaan yang dibentuk adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri). PNPM-Mandiri merupakan dasar atau acuan yang digunakan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan, pendampingan, pendanaan, dan inovasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM-

Mandiri. PNPM-Mandiri terdiri dari PNPM-Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Pedesaan, dan PNPM-Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai telah berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat yang target utamanya adalah masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, PNPM-Mandiri Pedesaan memprioritaskan kegiatan di bidang pembangunan desa, pengelolaan dana simpan pinjam bagi kelompok perempuan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan pembangunan; Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan pelatihan masyarakat; dan pendampingan masyarakat oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik, dan fasilitator keuangan merupakan 3 (tiga) komponen utama yang terdapat dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan. Demi terwujudnya pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan yang efektif dan efisien, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan yaitu pembangunan manusia, otonomi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipatif, demokratis, transparan, prioritas, dan berkelanjutan. Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan merupakan salah satu program yang dikelola oleh PNPM-Mandiri Pedesaan yang dikhususkan untuk kaum perempuan yang berasal dari RTM.

Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Simpan Pinjam Khusus Perempuan atau sering disingkat SPP merupakan salah satu program dalam PNPM-Mandiri Pedesaan. Program SPP bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan

khususnya kaum perempuan di pedesaan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Terdapat dua tujuan dari program SPP yang tercantum pada Penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) IV PNPM-Mandiri Pedesaan (2007:58) yaitu yang pertama bertujuan untuk mengembangkan potensi, memberikan kemudahan akses dan pemenuhan kebutuhan pendanaan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan pendapatan RTM. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mempercepat proses pendanaan usaha, memberikan kesempatan khususnya bagi kaum perempuan dalam peningkatan pendapatan, serta penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Pada program SPP, masyarakat didorong untuk ikut serta pada setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Program SPP sendiri berbentuk pemberian dana pinjaman yang dapat digunakan untuk modal usaha bagi kaum perempuan yang memiliki pengelolaan dana simpan dan pengelolaan dana pinjam.

Terdapat beberapa karakteristik kelompok SPP yaitu kelompok berisi dan dikelola oleh perempuan yang mengenal satu sama lain; minimal satu tahun telah melaksanakan pertemuan rutin; memiliki kelompok simpan pinjam dengan pengelolaan baik; memiliki modal dan simpanan yang berasal dari anggota yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman kepada anggota kelompok; dan kegiatan organisasi dan administrasi simpan pinjam berlangsung dengan baik dan sederhana. Semakin besarnya keterlibatan penduduk miskin dan kelompok marjinal dalam program pemberdayaan masyarakat, jumlah pengangguran yang semakin menurun dan meningkatnya pendapatan pada tahun pertama pelaksanaan program;

meningkatnya antusiasme masyarakat miskin pada lembaga kredit mikro; penurunan minat masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk melakukan pinjaman dana melalui rentenir; meningkatnya usaha yang dikelola oleh masyarakat; serta keterhubungan faktor dan produksi dan pasar. Kecamatan Kajoran merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Magelang yang melaksanakan program SPP demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum perempuan yang berasal dari RTM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif. UPK Bina Sejahtera merupakan subjek penelitian yang merupakan organisasi pelaksanaan program SPP. Dalam penelitian ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) responden yang turut serta dalam pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera di Kecamatan Kajoran. Dalam menganalisis dan membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini dibutuhkan data yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara terstruktur dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Peneliti melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program SPP terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Data-data dan/atau informasi akurat yang diperoleh melalui pengamatan, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk

tulisan untuk melengkapi pedoman wawancara.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada responden yang dipilih melalui pertimbangan tertentu yakni mereka yang dianggap berkompeten dalam program SPP serta memenuhi kriteria untuk dijadikan responden. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang yang menjadi responden dalam penelitian ini dimana responden tersebut terdiri dari 4 (empat) orang petugas pada UPK Bina Sejahtera yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan staf serta 29 (dua puluh sembilan) anggota program SPP yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) desa di Kecamatan Kajoran.

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan dokumen yang digunakan sebagai pelengkap dari metode penelitian sebelumnya yaitu observasi dan wawancara berupa identitas instansi, pengurus dan anggota program SPP, dan dokumen yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang

2. Data pendukung atau sering disebut dengan data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen organisasi, berita, hasil penelitian, serta literatur lain berupa laporan pelaksanaan program SPP.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Salah satu daerah di Kabupaten Magelang yang melaksanakan program pemberdayaan warisan dari PNPM-Mandiri Pedesaan adalah Kecamatan Kajoran. Kecamatan Kajoran terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) desa. Jumlah

penduduk yang berada di Kecamatan Kajoran sebanyak 61.830 jiwa yang terdiri dari 30.465 perempuan dan 31.365 laki-laki (BPS Kabupaten Magelang 2022) dengan 20.631 KK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah 2022). Pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Kajoran dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan atau sering disingkat dengan UPK yang bernama UPK Bina Sejahtera. Terdapat 2 (dua) jenis kegiatan pinjaman modal usaha yang dikelola oleh UPK Bina Sejahtera yaitu program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Unit Ekonomi Produktif (UEP).

Peneliti melakukan penelitian terkait perkembangan kesejahteraan masyarakat pada program SPP di Kecamatan Kajoran kepada 33 (tiga puluh tiga) informan yang terdiri dari 4 (empat) orang petugas pada UPK Bina Sejahtera dalam hal ini ketua, sekretaris, bendahara, staf, dan 29 (dua puluh sembilan) anggota SPP yang tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) desa di Kecamatan Kajoran menggunakan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) guna mengetahui sasaran dan tujuan yang ingin dicapai; mengetahui SDM/SDA, sarana dan prasarana pendukung, anggaran, serta prosedur pelaksanaan program; menetapkan kriteria penerima dana pinjaman, penyaluran dana, serta pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat; dan melakukan penilaian terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian terkait efektivitas pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa program SPP di Kecamatan Kajoran memiliki peran penting dalam meningkatkan

kesejahteraan dalam hal ini adalah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sasaran dan tujuan program SPP pada UPK Bina Sejahtera yaitu kaum perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM) produktif di Kecamatan Kajoran dengan tujuan meningkatkan pendapatan guna pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan program yang tercantum dalam Penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) IV PNPM-Mandiri Pedesaan (2007:58) yaitu yang pertama bertujuan untuk mengembangkan potensi, memberikan kemudahan akses dan pemenuhan kebutuhan pendanaan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan pendapatan RTM. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mempercepat proses pendanaan usaha, memberikan kesempatan khususnya bagi kaum perempuan dalam peningkatan pendapatan, serta penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Selain itu, sasaran dan tujuan program SPP pada UPK Bina Sejahtera juga sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berkelanjutan, dan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum PNPM-Mandiri. PNPM-Mandiri terdiri dari PNPM-Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Pedesaan, dan PNPM-Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan. Dengan demikian, pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dapat dikatakan efektif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ravianto (Rama et al. 2023) bahwa efektivitas adalah

kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang diharapkan.

Program SPP merupakan warisan dari program pemberdayaan sebelumnya yaitu PPK dan PNPM-Mandiri Pedesaan. Pada tahun 2023, UPK Bina Sejahtera menyediakan anggaran senilai 8,6 M. Anggaran yang tersedia dikatakan sangat mencukupi untuk memberikan pinjaman modal usaha bagi anggota SPP untuk meningkatkan usahanya. Dari segi pendanaan input, pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera di Kecamatan Kajoran dapat dikatakan baik. Pelaksanaan pemberian modal usaha kepada anggota SPP dilakukan secara langsung oleh petugas UPK dengan maksimal dana yang dapat dipinjam sebesar 10 juta (sepuluh juta rupiah). Dana pinjaman modal usaha tersebut akan diberikan kepada anggota SPP satu bulan setelah berkas-berkas permohonan pengajuan dinyatakan lengkap dan merupakan hasil dari Musyawarah Pendanaan yang dipimpin oleh Tim Pendanaan. Dalam pelaksanaan Musyawarah Pendanaan, juga Pengurus Harian BKAD, BP-UPK, UPK dan Tim Verifikasi. Berkas-berkas tersebut terdiri dari pengisian formulir yang berisi perjanjian tentang kesiapan untuk melunasi pinjaman, fotocopy identitas suami istri, dan melakukan wawancara singkat dengan petugas. Meski pada awal pelaksanaan program tersebut ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana pinjaman dimana ditemukan bahwa anggota yang terdaftar dalam program SPP merupakan kaum perempuan namun dalam pelaksanaan usaha tersebut dikelola oleh orang lain dalam hal ini laki-laki. Dalam pelaksanaan SPP pada UPK Bina Sejahtera juga melibatkan Petugas Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (PPKED) yang merupakan pelaku atau penerima manfaat dari program tersebut yang berada di setiap desa dan bertugas

untuk melakukan bimbingan serta pembinaan kelompok.

Dalam pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera Kecamatan Kajoran, dilakukan juga pengawasan 2 (dua) kali dalam satu bulan terhadap UPK oleh BP-UPK guna mengidentifikasi kelayakan serta memberikan laporan mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang ada pada UPK tersebut. Badan Pengawas-UPK (BP-UPK) yang bertugas untuk memantau serta mengawasi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam tersebut. Selain itu dalam menjalankan program SPP, petugas UPK dalam satu tahun melakukan beberapa kali kunjungan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Kajoran dengan tujuan melakukan sosialisasi tentang program SPP terhadap kaum perempuan dalam RTM. Menurut hasil penelitian, pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera sudah tepat sasaran yaitu kaum perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin (RTM) produktif. Pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera juga telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sukmasari (Oktriawan, Adriansah, and Alisa 2021) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi tercukupinya kebutuhan dasar baik kebutuhan sandang maupun papan, terjangkau biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang berkualitas, serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa anggota SPP di Kecamatan Kajoran dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dinilai efektif sesuai dengan pendapat Supardi (Rama et al. 2023), efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencapai kebutuhan dan rencana

baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Mardikanto dkk. (Nardin 2019), dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi tepat guna. Hal ini telah sejalan dengan prosedur pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera dimana masyarakat yang terlibat dalam program tersebut terdiri dari pengurus inti dan tim perbantuan, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran yang dinilai sangat cukup guna pemberian dana pinjaman modal usaha. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh pengurus program SPP melalui pelatihan baik dalam hal inovasi maupun promosi terhadap usaha yang dijalankan.

Kriteria penerima serta tata cara penyaluran pendanaan pinjaman modal usaha pada pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran telah sesuai dengan ketentuan program SPP. Hasil penelitian menjelaskan terkait ketepatan sasaran dalam pemberian dana pinjaman modal usaha. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan pengembangan usaha yang diberikan oleh petugas UPK mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat sehingga pendapatan anggota SPP dapat mengalami peningkatan. Terdapat 2 (dua) petugas UPK Bina Sejahtera yang datang ke 29 (dua puluh sembilan) desa di Kecamatan Kajoran untuk menjelaskan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Materi sosialisasi ini sendiri berisi tentang pengertian terkait program pemberdayaan masyarakat dalam hal ini simpan pinjam yang dikhususkan untuk

kaum perempuan dan cara meningkatkan penjualan dengan melakukan promosi dan penjualan melalui media sosial dan *marketplace* seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Petugas UPK Bina Sejahtera juga melakukan pelatihan kepada anggota SPP guna meningkatkan keterampilan yang dapat menjadi peluang usaha kedepannya dengan melakukan modifikasi atau menambah keragaman pada usaha yang telah dimiliki sebelumnya. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program SPP pada UPK Bina Sejahtera, sejalan dengan indikator keberhasilan program SPP dalam Penjelasan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) IV PNPM-Mandiri Pedesaan (2007:58) yaitu semakin besarnya keterlibatan penduduk miskin dan kelompok marginal dalam program pemberdayaan masyarakat, jumlah pengangguran yang semakin menurun dan meningkatnya pendapatan pada tahun pertama pelaksanaan program; meningkatnya antusiasme masyarakat miskin pada lembaga kredit mikro; penurunan minat masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk melakukan pinjaman dana melalui rentenir; meningkatnya usaha yang dikelola oleh masyarakat; serta keterhubungan faktor dan produksi dan pasar.

Usaha yang dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Kajoran khususnya kaum perempuan pada program SPP termasuk dalam industri kecil atau industri rumah tangga. Eyestone, R. (Meutia 2017) menjelaskan bahwa hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya disebut dengan kebijakan publik dan menurut pendapat Thomas R. Dye (Dan et al. 2000) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala ketentuan pemerintah yang perlu dilakukan maupun tidak dilakukan. Evaluasi kebijakan bertujuan yaitu menilai kesesuaian pelaksanaan

suatu program/kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai, mengukur dampak, memberikan umpan balik. Dalam hal ini dapat berupa perbaikan/penyempurnaan implementasi, memberikan rekomendasi dalam pembuatan keputusan, para petugas pada UPK Bina Sejahtera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang membuat anggota SPP lambat berkembang yaitu keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau pengembalian dana pinjaman modal usaha. Dengan ditugaskannya Tim Penyehat Pinjaman yang terdiri dari ketua dalam hal ini Kapolsek Kajoran, Danramil Kajoran selaku wakil ketua, beranggotakan seluruh kelembagaan dalam UPK Bina Sejahtera, dan/atau Tokoh Masyarakat, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan dana pinjaman modal usaha sudah sepenuhnya berhasil dikembalikan. Selain itu, Petugas Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (PPKED) yang terdiri dari 1 (satu) orang pada masing-masing desa di Kecamatan Kajoran juga bertujuan untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi para anggota SPP sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Thomas R. Dye (Zakirin and Arifin 2022) berpendapat bahwa dampak kebijakan atau sering disebut dengan *policy impact/ policy consequences* merupakan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Penilaian terhadap dampak suatu kebijakan bertujuan untuk mengetahui efek yang terjadi berupa hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Selain itu, Winarno, B. (Zakirin and Arifin 2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam memperhitungkan dampak suatu kebijakan yaitu dampak kebijakan yang

diharapkan (*intended consequences*) atau yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) pada masalah serta pada individu maupun kelompok yang terlibat dalam kebijakan; dampak yang melimpah atau termasuk dalam limbah kebijakan (*externalities or spillover effects*) dimana suatu kebijakan tersebut memiliki kemungkinan berdampak baik di luar sasaran atau tujuan kebijakan; pada masa yang akan datang kemungkinan terdapat dampak pada suatu kebijakan; kemungkinan suatu kebijakan akan berdampak pada biaya langsung (*direct costs*); dan kemungkinan suatu kebijakan berdampak terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) individu maupun kelompok. Dampak dari implementasi program SPP di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu pendapatan yang diperoleh masyarakat khususnya kaum perempuan yang berasal dari RTM. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, kaum perempuan dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Peningkatan pendapatan yang diperoleh anggota SPP setelah memperoleh dana pinjaman modal usaha berkisar 30% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelumnya. Selain pendapatan anggota SPP yang mengalami peningkatan, anggaran pada UPK Bina Sejahtera khususnya dalam program SPP juga mengalami peningkatan.

Total anggaran yang merupakan warisan PNPM-Mandiri Pedesaan tercatat pada tahun 2014 sebesar 2,7 M, sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 8,6 M. Anggaran tersebut dapat dikatakan sangat mencukupi dalam pemberian dana pinjaman modal usaha bagi anggota program SPP yang merupakan RTM produktif. Hal ini selaras dengan kesejahteraan masyarakat menurut pendapat Sukmasari

(Oktriawan, Adriansah, and Alisa 2021) merupakan suatu kondisi tercukupinya kebutuhan dasar baik kebutuhan sandang maupun papan, terjangkau biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang berkualitas, serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani serta pengembalian 100% terhadap dana pinjaman modal usaha lunas. Hal ini menunjukkan bahwa selain ketepatan sasaran program dan peningkatan pendapatan kaum perempuan di Kecamatan Kajoran, target pengembalian dana pinjaman modal usaha telah berhasil dijalankan pada program SPP UPK Bina Sejahtera.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Kajoran yang dilaksanakan pada 29 (dua puluh sembilan) desa dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan tujuan dari program dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Telah sesuai sasaran pada program SPP UPK Bina Sejahtera yaitu kaum perempuan yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif.
2. Dana pinjaman modal usaha pada program SPP 100% telah dapat dikembalikan.
3. Telah dilaksanakannya pendampingan dan sosialisasi yang diberikan oleh petugas UPK Bina Sejahtera terkait program SPP dalam hal ini mengelola dan mengembangkan usaha.
4. Adanya peningkatan anggaran yang dapat digunakan sebagai dana pinjaman modal usaha bagi anggota SPP pada tahun 2023 sebesar 5,9 M dimana semula tersedia anggaran sebesar 2,7 M pada tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Maulani. 2019. "Implementasi

- Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019.” : 8–30. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770>.
- Arifin, Annada Farhat, and Tri Yuniningsih. 2019. “Efektivitas Organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS).” *Journal of Public Policy and Management Review* 8(2): 546–58.
- Bachtiar, Rayendra Wahyu, and Van Der Vleuten. 2016. “Model Evaluasi Countenance Stake Menggunakan Pendekatan Analisis Rasch Terhadap Keterampilan.” *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan ...* 6(1): 32–40. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alminhaj/article/view/3402>.
- Bambang Setyadarma, Tri Tjahjo Poernomo, and Husni Indrawati Wijaya Putri. 2021. “Pelaksanaan Kegiatan Rumah Swadaya (Bantuan Sosial Renovasi Rumah Bagi Pasukan Kuning) Di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Surabaya Berdasarkan Siklus Angsuran 2 Bulanan (Multi Years Program).” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1(4): 649–62. doi:10.53625/jabdi.v1i4.276.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. “Efektifitas Kerja.” *NBER Working Papers*: 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Dan, Pengaturan, Pembinaan Pedagang, Kaki Lima, Christine Gitta, Candra Puspita, Margareta Suryaningsih, and Jurusan Administrasi Publik. 2000. “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang.” : 1–12. www.fisip.undip.ac.id.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. “Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi.” *UM Jakarta Press*: 188.
- Erawati, Irma, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah. 2017. “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” *Jurnal Office* 3(1): 13. doi:10.26858/jo.v3i1.3450.
- Harahap, Hasriyati, Zulqaidah, Rama Satya Tanjung, Khairul Amri Silalahi, and Muhammad Iqbal. 2024. “Model Evaluasi Dalam Program Pendidikan.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5(3): 3382–91. doi:10.54373/imeij.v5i3.1364.
- Julika, Septaning Rena, and Irma Irawati P. 2016. “Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa.” *Public Corner* 11(2): 1–16.
- Martani, Jemsly &. 2016. “Strategi Pendekatan Komprehensif Dan Terintegrasi , (Jakarta: UI-Press, 2011), 265. 16.” : 16–43.
- Maryani, Dedeh and Nainggolan, Ruth Roselin E. 2019. “Isi_Buku_Bu_Dedeh_Revisi_14.Docx(1)-Halaman-1-2,20,51-52,89-90,127-128,236-237.” : 236–37.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. Analisis Kebijakan Publik *Analisis Kebijakan Publik*.
- Nardin, Yulianus. 2019. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8(3): 140–45. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>.
- Oktriawan, Wawan, Adriansah Adriansah, and Siti Alisa. 2021. “Tingkat Kesejahteraan

- Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2(2): 199–210.
doi:10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96.
- Pratama, Alfian Gilang. 2022. “Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLah) Pada SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Anggaran 2021.” (2016): 8–25.
- Rama, Alzet, Ambiyar Ambiyar, Fahmi Rizal, Nizwardi Jalinus, Waskito Waskito, and Rizky Ema Wulansari. 2023. “Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process Dan Product (CIPP) Di Sekolah Menengah Kejuruan.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8(1): 82.
doi:10.29210/30032976000.
- Ritonga, Ramayana, Asep Saepudin, and Uyu Wahyudin. 2019. “Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick Empat Level Dalam Mengevaluasi Program Diklat Di Balai Besar Pelatihan Pertanian (Bbpp) Lembang.” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14(1): 12.
doi:10.17977/um041v14i1p12-21.
- Tuaty, Omar Dision. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor Omar Dision Tuaty Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi , Universit.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(September): 605–20.
- Yunida, E. 2017. “Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.” : 1–23.
- Zakirin, Muhammad, and Jauhar Arifin. 2022. “Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.” *Japb* 5(1): 256–71.
<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>.
- Agustian, Maulani. 2019. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019.” : 8–30.
<http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770>.
- Arifin, Annada Farhat, and Tri Yuniningsih. 2019. “Efektivitas Organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS).” *Journal of Public Policy and Management Review* 8(2): 546–58.
- Bachtiar, Rayendra Wahyu, and Van Der Vleuten. 2016. “Model Evaluasi Countenance Stake Menggunakan Pendekatan Analisis Rasch Terhadap Keterampilan.” *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan ...* 6(1): 32–40.
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alminhaj/article/view/3402>.
- Bambang Setyadarma, Tri Tjahjo Poernomo, and Husni Indrawati Wijaya Putri. 2021. “Pelaksanaan Kegiatan Rumah Swadaya (Bantuan Sosial Renovasi Rumah Bagi Pasukan Kuning) Di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal Surabaya Berdasarkan Siklus Angsuran 2 Bulanan (Multi Years Program).” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1(4): 649–62.
doi:10.53625/jabdi.v1i4.276.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. 2013. “Efektifitas Kerja.” *NBER Working Papers*: 89.

- <http://www.nber.org/papers/w160>
19.
- Dan, Pengaturan, Pembinaan Pedagang, Kaki Lima, Christine Gitta, Candra Puspita, Margareta Suryaningsih, and Jurusan Administrasi Publik. 2000. "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang." : 1–12. www.fisip.undip.ac.id.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2019. "Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi." *UM Jakarta Press*: 188.
- Erawati, Irma, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah. 2017. "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." *Jurnal Office* 3(1): 13. doi:10.26858/jo.v3i1.3450.
- Harahap, Hasriyati, Zulqaidah, Rama Satya Tanjung, Khairul Amri Silalahi, and Muhammad Iqbal. 2024. "Model Evaluasi Dalam Program Pendidikan." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5(3): 3382–91. doi:10.54373/imeij.v5i3.1364.
- Julika, Septaning Rena, and Irma Irawati P. 2016. "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa." *Public Corner* 11(2): 1–16.
- Martani, Jemsly &. 2016. "Strategi Pendekatan Komprehensif Dan Terintegrasi , (Jakarta: UI-Press, 2011), 265. 16." : 16–43.
- Maryani, Dedeh and Nainggolan, Ruth Roselin E. 2019. "Isi Buku Bu Dedeh Revisi_14. Docx(1)-Halaman-1-2,20,51-52,89-90,127-128,236-237." : 236–37.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. Analisis Kebijakan Publik *Analisis Kebijakan Publik*.
- Nardin, Yulianus. 2019. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8(3): 140–45. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>.
- Oktriawan, Wawan, Adriansah Adriansah, and Siti Alisa. 2021. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2(2): 199–210. doi:10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96.
- Pratama, Alfian Gilang. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLah) Pada SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Anggaran 2021." (2016): 8–25.
- Rama, Alzet, Ambiyar Ambiyar, Fahmi Rizal, Nizwardi Jalinus, Waskito Waskito, and Rizky Ema Wulansari. 2023. "Konsep Model Evaluasi Context, Input, Process Dan Product (CIPP) Di Sekolah Menengah Kejuruan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8(1): 82. doi:10.29210/30032976000.
- Ritonga, Ramayana, Asep Saepudin, and Uyu Wahyudin. 2019. "Penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick Empat Level Dalam Mengevaluasi Program Diklat Di Balai Besar Pelatihan Pertanian (Bbpp) Lembang." *Jurnal Pendidikan Nonformal* 14(1): 12. doi:10.17977/um041v14i1p12-21.
- Tuaty, Omar Dision. 2023. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur

Kabupaten Alor Omar Dision
Tuaty Program Studi Manajemen ,
Fakultas Ekonomi , Universit.”
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
9(September): 605–20.

Yunida, E. 2017. “Evaluasi Kebijakandi
Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini.” : 1–23.

Zakirin, Muhammad, and Jauhar Arifin.
2022. “Evaluasi Kebijakan Dilihat
Dari Aspek Dampak Program
Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa
Hayaping Kecamatan Awang
Kabupaten Barito Timur.” *Japb*
5(1): 256–71.
<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>.